

# PANDUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SITUASI PANDEMI COVID 19



KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
2020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga panduan singkat mengenai pelayanan kesehatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam situasi pandemi Covid-19 ini dapat diselesaikan. Pada situasi pandemi Covid-19 diharapkan setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat mengakses pelayanan Keluarga Berencana sehingga tetap terlindungi oleh alat kontrasepsi, terjaga keselamatan dan kesehatannya. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang tetap dapat memberikan pelayanan KB diharapkan meningkatkan kerjasama dengan jejaring, dan penting untuk selalu memperhatikan prosedur perlindungan diri pada masa pandemi Covid-19.

Kami berharap jejaring yang sudah terbentuk sebelum situasi pandemi ini dapat terus berjalan meskipun dengan berbagai penyesuaian. Kami juga berharap Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mensosialisasikan panduan ini kepada seluruh Puskesmas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi kerja keras kita semua.

Jakarta, 29 April 2020

Direktur Kesehatan Keluarga



dr. Erna Mulati, MSc., CMFM



**PANDUAN**  
**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM**  
**SITUASI PANDEMI COVID 19**

**I. LATAR BELAKANG**

Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO, 2020). Dan juga telah dinyatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan nomor 9 A Tahun 2020 diperpanjang melalui Keputusan nomor 13 A tahun 2020 sebagai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Kemudian dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang maka diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Sampai tanggal 26 April 2020 Covid-19 telah menginfeksi 2.900.422 secara global dan Indonesia telah mengalami 8.882 kasus Covid-19 dengan jumlah 1.107 kasus sembuh dan 743 kasus meninggal, sebagian besar kasus terkonfirmasi dari usia produktif sebesar 44%.

Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19 ini dilakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan penularan Covid-19. Kondisi ini menyebabkan dampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Pada kondisi pandemi ini diharapkan Pasangan Usia Subur (PUS) terutama PUS dengan 4 Terlalu (4T) diharapkan tidak hamil sehingga petugas kesehatan perlu memastikan mereka tetap menggunakan kontrasepsi. Untuk itu, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, pelayanan tetap dilakukan tetapi dengan menerapkan prinsip pencegahan pengendalian infeksi dan *physical distancing*.

Berdasarkan rekomendasi WHO dan masukan dari organisasi profesi dan lintas sektor terkait (BKKBN) maka disepakati rekomendasi untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi pada situasi bencana sebagai berikut.

## II. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

### A. Pesan Bagi Masyarakat terkait Pelayanan Keluarga Berencana Pada Situasi Pandemi Covid-19

1. Tunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir
2. Akseptor KB sebaiknya tidak datang ke petugas kesehatan, kecuali yang mempunyai keluhan, dengan syarat membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas Kesehatan.
3. Bagi akseptor Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/Implan yang sudah habis masa pakainya, jika tidak memungkinkan untuk datang ke petugas Kesehatan dapat menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas PLKB atau kader melalui telepon. Apabila tidak tersedia bisa menggunakan cara tradisional (pantang berkala atau senggama terputus).
4. Bagi akseptor Suntik diharapkan datang ke petugas kesehatan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian sebelumnya. Jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan kondom yang dapat diperoleh dengan menghubungi petugas PLKB atau kader melalui telfon. Apabila tidak tersedia bisa menggunakan cara tradisional (pantang berkala atau senggama terputus)
5. Bagi akseptor Pil diharapkan dapat menghubungi petugas PLKB atau kader atau Petugas Kesehatan via telfon untuk mendapatkan Pil KB.
6. Ibu yang sudah melahirkan sebaiknya langsung menggunakan KB Pasca Persalinan (KBPP)

7. Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelaksanaan konseling terkait KB dapat diperoleh secara *online* atau konsultasi via telepon

## B. Rekomendasi bagi Petugas Kesehatan terkait Pelayanan Keluarga Berencana pada Situasi Pandemi Covid-19

1. Petugas Kesehatan dapat memberikan pelayanan KB dengan syarat menggunakan APD lengkap sesuai standar dan sudah mendapatkan perjanjian terlebih dahulu dari klien :
  - a. Akseptor yang mempunyai keluhan
  - b. Bagi akseptor AKDR/Implan yang sudah habis masa pakainya,
  - c. Bagi akseptor Suntik yang datang sesuai jadwal.
2. Petugas Kesehatan tetap memberikan pelayanan KBPP sesuai program yaitu dengan mengutamakan metode MKJP (AKDR Pasca Plasenta / MOW)
3. Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan PL KB dan Kader untuk minta bantuan pemberian kondom kepada klien yang membutuhkan yaitu :
  - a. Bagi akseptor AKDR/Implan yang sudah habis masa pakainya, tetapi tidak bisa kontrol ke petugas kesehatan
  - b. Bagi akseptor Suntik yang tidak bisa kontrol kembali ke petugas Kesehatan sesuai jadwal
4. Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan PLKB dan Kader untuk minta bantuan pemberian Pil KB kepada klien yang membutuhkan yaitu: Bagi akseptor Pil yang harus mendapatkan sesuai jadwal

5. Pemberian Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelaksanaan konseling terkait kesehatan reproduksi dan KB dapat dilaksanakan secara *online* atau konsultasi via telepon



### C. Hal Yang Perlu Diperhatikan oleh Petugas Kesehatan dalam Pelaksanaan Pelayanan

1. Mendorong semua PUS untuk menunda kehamilan dengan tetap menggunakan kontrasepsi di situasi pandemi Covid-19, dengan meningkatkan penyampaian informasi/KIE ke masyarakat
2. Petugas Kesehatan harus menggunakan APD dengan level yang disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan dan memastikan klien yang datang menggunakan masker dan membuat perjanjian terlebih dahulu
3. Kader dalam membantu pelayanan juga diharapkan melakukan upaya pencegahan dengan selalu menggunakan masker dan segera mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau handsanitizer setelah ketemu klien
4. Berkoordinasi dengan PLKB kecamatan untuk ketersediaan pil dan kondom di Kader atau PLKB, sebagai alternative pengganti bagi klien yang tidak dapat ketemu petugas Kesehatan
5. Melakukan koordinasi untuk meningkatkan peran PL KB dan kader dalam membantu pendistribusian pil KB dan kondom kepada klien yang membutuhkan, yang tetap berkoordinasi dengan petugas Kesehatan
6. Memudahkan masyarakat untuk untuk mendapatkan akses informasi tentang pelayanan KB di wilayah kerjanya, misalnya dengan membuat hotline di Puskesmas dan lain-lain

### III. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CATIN (KESPRO CATIN) DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

#### A. Pesan bagi Calon Pengantin Pada Situasi Pandemi Covid-19

1. Bimbingan perkawinan, pemeriksaan kesehatan, konsultasi keluarga dan bimbingan lainnya ditunda pelaksanaannya, kecuali pelayanan administrasi dan pencatatan nikah
2. Materi KIE terkait kesehatan reproduksi calon pengantin diharapkan tetap dibaca yang dapat diperoleh secara online, salah satunya dapat diakses melalui web bimbingan perkawinan sampai kondisi pandemi berakhir, antara lain : [www.bimbinganperkawinan.com](http://www.bimbinganperkawinan.com)

#### B. Rekomendasi bagi Petugas Kesehatan terkait Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin pada Situasi Pandemi Covid-19

1. Bimbingan perkawinan, pemeriksaan kesehatan, konsultasi keluarga dan bimbingan lainnya ditunda pelaksanaannya, kecuali pelayanan administrasi dan pencatatan nikah.
2. Memastikan dan memantau calon pengantin untuk mendapatkan dan membaca Materi KIE terkait kesehatan reproduksi calon pengantin secara online sampai kondisi pandemi berakhir.